



### **Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

*Economic Growth and Local Own-source Revenue towards Regional Financial Independence*

**Asyhari Rosidin<sup>1)</sup>**

**Acwin Hendra Saputra<sup>2)</sup>**

Badan Pendidikan dan pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan<sup>1)</sup>

Jurusan Manajemen Keuangan, Politeknik Keuangan Negara STAN<sup>2)</sup>

email: [derozi.21@gmail.com](mailto:derozi.21@gmail.com) <sup>1)</sup>

[acwin@pknstan.ac.id](mailto:acwin@pknstan.ac.id) <sup>2)</sup>

Submit: 26 September 2020; Direvisi; 16 Oktober 2020; Publish; 30 Oktober 2020

#### **Abstract**

*This research aims to determine the effect of economic growth and local revenue on the level of regional financial independence in districts/cities in East Java province for the period 2006-2016. This study's secondary data sources came from Statistics Indonesia (BPS) and The Audit Board of Indonesia (BPK RI) audit reports. We choose the panel data analysis technique to provide more information, more variation, less co-linearity between variables, more degree of freedom, and more efficiency. The results showed that the variables of economic growth and local own-source revenue, either alone or together, had a significant positive effect on the level of regional financial independence.*

**Keywords:** *Fiscal Transfer; Economic Growth; Local own-source Revenue; Regional Financial Independence*

#### **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2006-2016. Sumber data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari BPS, dan laporan hasil audit BPK RI. Teknik analisis data panel dipilih agar memberi lebih banyak informasi, lebih banyak variasi, dan sedikit ko-linear antar variabel, lebih banyak degree of freedom, dan lebih efisien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah baik sendiri sendiri tau bersama berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

**Kata Kunci :** Transfer Daerah; pertumbuhan ekonomi; pendapatan asli daerah; kemandirian keuangan daerah

## **1. PENDAHULUAN**

Salah satu tujuan diberlakukannya otonomi daerah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana yang telah dilakukan perubahan terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 adalah untuk menumbuhkan tingkat kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan pasal 1 ayat 6 dikatakan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan otonomi tersebut pemerintah daerah berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pentingnya peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena menurut (Nur'ainy et al., 2013) pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini diperkuat oleh (Darwanto & Yustikasari, 2007) yang mengemukakan pentingnya peran pemerintah dengan cara pemanfaatan faktor yang mempengaruhi pembangunan daerah seperti sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor, situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan.

Perkembangan ekonomi pada tataran wilayah provinsi yang diukur dengan menggunakan PDRB. Untuk PDRB seluruh provinsi, Jawa Timur (Jatim) menduduki urutan pertama di luar wilayah ibu kota negara dengan urutan kedua dan ketiga adalah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Menurut (Sukarwo, 2017) pertumbuhan ekonomi Jatim selalu di atas rata-rata nasional, yaitu pada semester I tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Jatim sebesar 5,21 persen atau lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,01 persen. Perkembangan ekonomi dan keuangan Jatim tentu ditunjang oleh perkembangan ekonomi 38 kabupaten/kota dengan kondisi geografis dan sosial budaya yang beragam antar wilayah. Hal ini diperkuat oleh (BPS Provinsi Jawa Timur, 2015) bahwa dalam struktur ekonomi Jatim pada tahun 2015 menghasilkan nilai tambah PDRB atas harga berlaku sebesar Rp1.689,88 triliun, dan atas harga konstan 2010 sebesar Rp1.331,42 triliun. Nilai ini setara dengan 14,50 persen perekonomian nasional, sedikit lebih tinggi dibanding tahun 2014 yang sebesar 14,41 persen.

Untuk melihat perkembangan keuangan daerah dapat dilakukan dengan membuat rasio keuangan daerah yang salah satunya adalah rasio pertumbuhan. Rasio pertumbuhan diperoleh dengan mengukur perbandingan hasil Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang dicapai suatu periode dengan periode sebelumnya. Menurut (Sujarwoto & Wachid, 2015) pertumbuhan PAD Jawa Timur dalam setiap tahun semakin baik dibanding dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan simultan pada Provinsi Jawa Timur tentunya akan menimbulkan perbedaan aktivitas ekonomi di level pemerintah kabupaten/kota sehingga akan memicu terjadinya disparitas antarwilayah, hal ini selaras dengan pendapat (Courchene dan Melvin, 2017). Zhuravskayaa (2000) menyatakan bahwa bagi hasil antara pemerintah daerah dan lokal tidak memberikan insentif kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan basis pajak atau menyediakan barang publik

Namun apabila melihat fakta tentang rasio kemandirian keuangan daerah yang juga merupakan perbandingan antara PAD dengan transfer

pemerintah pusat dan provinsi beserta pinjaman daerah menunjukkan hal yang sebaliknya. Studi teoritis dan empiris dalam ekonomi publik menunjukkan bahwa individu memandang hibah dan pendapatan daerah sendiri melalui perspektif yang berbeda (Rodden, 2002). Menurut (Yuana, 2016) perkembangan tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Jatim berada di bawah kisaran 10% dan dikategorikan sebagai wilayah yang sangat kurang mandiri atau kategori kemandirian terendah. Kategori ini didasarkan pada publikasi Tim Penelitian dan Pengembangan (Lit-bang) Kementerian Dalam Negeri-Fisipol UGM dalam (Nurhayani, 2010). Tingkat kemandirian keuangan sesuai data tersebut memperlihatkan kesehatan keuangan daerah pada 38 kabupaten/kota di wilayah Jatim.

Menurut (Kementerian PPN / Bappenas, 2016) dalam buku *Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan III Tahun 2016* dikemukakan bahwa wilayah Pulau Jawa tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu pada tahun 2014 peranan Jawa-Luar Jawa masing-masing sebesar 58,3 persen berbanding 41,7 persen. Pada tahun 2014, disparitas wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI) – Kawasan Timur Indonesia (KTI) tidak mengalami perubahan dalam 12 tahun terakhir sebesar 83% berbanding 17%. Sehingga dengan kondisi demikian berarti wilayah di Pulau Jawa berkontribusi besar dalam menyumbang perekonomian nasional dibandingkan pulau di wilayah lainnya, dimana rata-rata tertinggi pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan menggunakan PDRB perkapita, Jawa Timur berada pada level pertama di luar wilayah ibu kota. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi seharusnya tingkat kemandirian keuangan daerah juga tinggi, namun fakta pada Provinsi Jawa Timur menunjukkan sebaliknya, yaitu tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota Jawa Timur pada kategori sangat rendah.

Beberapa peneliti telah melakukan studi mengenai hubungan antara penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian tersebut diantaranya menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dengan sebagian data penelitian berupa data panel dan sebagian yang lain data time series. Pertama penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Sjadili, 2013) yang berjudul “Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Pinjaman Daerah terhadap tingkat kemandirian daerah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan bukti empiris dalam hubungannya komponen APBD yang berupa transfer pemerintah, belanja modal, dan pinjaman daerah terhadap kemandirian daerah. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa transfer pemerintah atau dana perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian daerah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Tahar, Afrizal dan Zakhiya, 2011) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah” tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk menguji besarnya pengaruh PAD dan DAU terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2003-2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh (Nur'ainy et al., 2013) yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kota

Di Jawa Barat tahun 2008-2010)”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah tingkat kota di Jawa Barat. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan dua faktor yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan uraian di atas bahwa seharusnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan asli daerah secara mandiri dan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan asli daerah secara bersama-sama dapat berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Populasi penelitian ini yakni kabupaten dan kota di Jawa Timur. Data yang digunakan adalah selama sebelas tahun mulai tahun 2006 sampai dengan 2016, dimana kabupaten dan kota di Jawa Timur tidak terdapat pemekaran selama periode tahun tersebut. Periode tersebut diambil agar penelitian ini bisa menggunakan data terbaru sehingga diharapkan hasilnya masih relevan dengan kondisi saat ini. Data populasi tersebut akan mengalami penyaringan berkaitan dengan kelengkapan data realisasi PAD, Pinjaman Daerah, DAU, DAK, Dana Perimbangan, dan Statistik PDRB. Data pemerintah kabupaten/kota yang didapatkan menunjukkan jumlah kabupaten/kota per tahun 2006 adalah sebanyak 38 kabupaten/kota. Rincian data pemerintah kabupaten/kota periode 2006 sampai dengan 2016 adalah 418 data kabupaten/kota di Jawa Timur. Penyaringan atas populasi akan dilakukan berdasarkan kelengkapan data realisasi PAD, data PDRB, dan Dana Perimbangan. Dalam pengujian analisis regresi data panel pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah balanced panel. Peneliti menambahkan variabel kontrol karena variabel ini diharapkan dapat menjaga agar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor di luar model penelitian (Sugiyono, 2015).

Model penelitian yang terdiri dari variabel terikat, bebas, dan kontrol dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + b_7X_7 + \varepsilon$$

Keterangan:

- Y = Kemandirian keuangan daerah (KM)
- X1 = Pertumbuhan ekonomi (PDRB)
- X2 = Pendapatan asli daerah (PAD)

Variabel kontrol:

- X3 = Belanja Modal (BM)
- X4 = Dana Bagi Hasil (DBH)
- X5 = Dana Alokasi Umum (DAU)
- X6 = Dana Alokasi Khusus (DAK)
- X7 = Populasi Penduduk (PDDK)
- b1- b7 = Koefisien Variabel.

Analisis regresi data panel merupakan metode analisis dengan struktur data yang berbentuk data panel. Data panel ini merupakan gabungan antara data *time series* dan *cross section* yang mana unit *cross section* yang sama namun diukur pada waktu yang berbeda. Data t merupakan waktu yang dipilih sejumlah 11 tahun dan n merupakan subjek yang menjadi objek penelitian sejumlah 38 kabupaten/kota sehingga jumlah observasi merupakan perkalian n dan t sebesar 418 observasi. Adapun jumlah setiap unit kabupaten/kota memiliki waktu yang sama untuk setiap individu atau subjek biasa disebut dengan *balanced panel*.

Sebelum masuk uji asumsi klasik dilakukan 3 uji untuk menentukan pemilihan model. Hal ini sebagaimana menurut (Widarjono, 2018) bahwa untuk mengestimasi model dengan data panel terdapat tiga teknik yang sering ditawarkan, yaitu model Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect. Pengujian dilakukan dengan Uji Chow untuk menentukan pilihan antara pendekatan *common effect* dan *fixed effect* dan Uji Hausman untuk menentukan pilihan atas metode *fixed effect* atau *random effect*.

#### Definisi Operasional

Secara ringkas definisi operasional atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1 Definisi Operasional Variabel Penelitian

No	Notasi	Arti	Definisi Variabel
1	PDRB	Pertumbuhan Ekonomi	PDRB per kapita
2	PAD	Pendapatan Asli Daerah	Nilai realisasi PAD
3	BM	Belanja Modal	Nilai realisasi Belanja Modal
4	DBH	Dana Bagi Hasil	Nilai realisasi Dana Bagi Hasil
5	DAK	Dana Alokasi Khusus	Nilai Dana Alokasi Khusus
6	DAU	Dana Alokasi Umum	Nilai Dana Alokasi Umum
7	PDDK	Jumlah Penduduk	Populasi kabupaten/kota

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 merupakan hasil uji chow pada seluruh kabupaten dan kota yang ada pada wilayah jawa timur mendapat nilai Chi Square sebesar 0,0000 yang berarti lebih kecil dari  $\alpha=0,05$  sehingga dapat diartikan bahwa pemilihan model FE lebih baik dibandingkan menggunakan model CE. Berdasarkan hasil yang diperoleh F hitung (294,7) lebih besar dari pada F tabel (0,5636) sehingga hasil uji chow ini menyimpulkan bahwa model yang tepat untuk digunakan adalah Fixed Effect karena F-hitung lebih besar dari pada F-tabel sebagaimana Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Signifikansi Model *Fixed Effect*

	F hitung	F tabel $\alpha = 1\%$	F tabel $\alpha = 5\%$
Kabupaten dan	294,7	0,5544	0,5636

Sumber: diolah dari data BPS dan BPK RI

Uji Hausman pada data kabupaten dan kota wilayah Jawa Timur masing-masing menunjukkan nilai p-value sebesar 0,0000 lebih kecil dari  $\alpha=0,05$  sehingga dapat diputuskan bahwa model regresi FE lebih baik

dibandingkan dengan RE. Begitu juga dengan nilai prob. Chi Square statistic adalah sebesar 69,43 lebih besar dari pada nilai kritis Chi Square dengan df 38 kabupaten dan kota  $\alpha = 1\%$  dan  $5\%$ , artinya dapat disimpulkan model yang lebih tepat digunakan adalah FE.

Tabel 3 Uji Signifikansi Model *Fixed Effect*

Test Summary	Chi-Sq.	Chi-Sq. d.f.	Prob
<i>Cross-Section random</i>	69,43	7	0,0000

Sumber: diolah dari data BPS dan BPK RI

Berdasarkan hasil uji normalitas melalui uji Histogram Normalitas di atas bahwa nilai Jarque Bera sebesar 0,696 dimana Chi-Square tabel bernilai 41,3 untuk derajat kebebasan dengan sampel 38 yang mana berarti bahwa Jarque Bera lebih kecil dari Chi-Square tabel sehingga menerima  $H_0$  atau data berdistribusi normal. Selain itu dengan p-value sebesar 0,706 dimana lebih besar dari 0,05 sehingga menerima  $H_0$  atau yang berarti residual berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Eviews 9 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Jarque Bera

	Jarque Bera	Probability
Kabupaten dan kota	0,696	0,706

Sumber: diolah dari data BPS dan BPK RI

Tabel 4. menunjukkan uji multikolinearitas yang antara PAD dengan PDRB memiliki nilai korelasi di bawah 0,8 atau 0,85, yaitu bernilai 0,2198. Sehingga dapat dikatakan bahwa berdasarkan uji tersebut antara variabel bebas PAD dan PDRB tidak memiliki signifikansi korelasi yang tinggi karena nilai korelasi berada di bawah nilai signifikan korelasi. Berikut ini hasil uji multikolinearitas melalui matriks korelasi.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas Matriks Korelasi

	BM	DAK	DAU	DBH	PAD	PDDK	PDRB
BM	1,0000						
DAK	0,4520	1,0000					
DAU	0,6467	0,5902	1,0000				
DBH	0,5501	0,1157	0,2562	1,0000			
PAD	0,8396	0,1853	0,4166	0,4710	1,0000		
PDDK	0,5984	0,2313	0,5347	0,4636	0,6096	1,0000	
PDRB	0,2277	-0,0091	0,0604	0,2067	0,2918	-0,0445	1,0000

Sumber: diolah dari data BPS dan BPK RI

Terdapat beberapa pilihan jenis uji heterokedastisitas yang dapat digunakan, pada Eviews 9, yaitu antara lain: Uji Breusch-Pagan-Godfrey, Park, Harvey, Glejser, ARCH dan White Test. Menurut Park dalam (Widarjono, 2018), varian gangguan yang tidak konstan atau masalah heteroskedastisitas muncul karena residual ini tergantung dari variabel independen yang ada di dalam model. Uji di atas merupakan uji heteroskedastisitas Breusch-Pagan-Godfrey dimana hasil nilai p-value

yang ditunjukkan dengan nilai Prob. Chi Square. Ho diterima bila Signifikansi > 0,05 berarti tidak terdapat heteroskedastisitas dan Ho ditolak bila Signifikansi < 0,05 yang berarti terdapat heteroskedastisitas. Nilai prob. F-statistik dan Chi Square masing-masing, yaitu sebesar 0,4878 dan 0,4838. Oleh karena nilai p-value > 0,05 maka terima H0 atau yang berarti bahwa model regresi bersifat homoskedastisitas atau dengan kata lain tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Tabel 6. Hasil Uji Heterokedastisitas Breusch-Pagan-Godfrey

Probability	Nilai
Prob. F statistic	0,4878
Prob. Chi-Square (Obs*R-squared)	0,4838

Sumber: diolah dari data BPS dan BPK RI

Sebagaimana pada uji heteroskedastisitas, pada dasarnya uji autokorelasi hanya dilakukan pada model Common Effect dan Fixed Effect. (Gujarati & Porter, 2009) menyatakan salah satu cara mengatasi autokorelasi pada model regresi adalah melalui penggunaan metode dengan estimator Generalized Least Square (GLS). Namun sebagaimana model terpilih sebelumnya telah menentukan FE sebagai cara untuk mengestimasi data penelitian, salah satu cara mengetes keberadaan autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Durbin Watson. Autokorelasi tidak terjadi pada Uji Durbin Watson apabila  $DW > DU$  dan  $DW < (4-DU)$ . Adapun setelah dilakukan running uji autokorelasi menghasilkan  $DW=1,953$  untuk  $K=2$ , sampel  $T= 418$  sehingga dapat disimpulkan bahwa model tersebut tidak terjadi autokorelasi. Berikut ini hasil dari uji autokorelasi Durbin Watson.

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson

+	<b>du=1,844</b>	<b>bebas</b>	<b>4-du= 2,15</b>	-
0	du	1,953	4-du	4-dl
dl				

Sumber: diolah dari data BPS dan BPK RI

### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Berdasarkan pengujian yang dilakukan sebagaimana Gambar 1, variabel PDRB memiliki koefisien regresi sebesar 24,014 dengan nilai prob t-statistic 0.0241. Berdasarkan nilai prob. t-statistik yang berada lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat KM yang mana kenaikan atau penurunan dari PDRB akan mempengaruhi naik atau turunnya tingkat kemandirian keuangan daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dapat diterima. Adapun nilai koefisien positif PDRB pada persamaan tersebut menunjukkan terdapat hubungan positif antara PDRB terhadap tingkat KM.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
BM	-0.010176	0.003079	-3.304785	0.0010
DAK	-0.008422	0.004437	-1.898009	0.0585
DAU	0.002396	0.001820	1.316758	0.1887
DBH	-0.024108	0.005422	-4.446498	0.0000
PAD	0.065047	0.001862	34.92814	0.0000
PDDK	-0.003933	0.000497	-7.906998	0.0000
PDRB	24.01418	10.60349	2.264743	0.0241
C	12.81785	1.046959	12.24294	0.0000

Gambar 1. Nilai Koefisien PDRB Regresi Data Panel

Penelitian yang sejalan adalah (Tahar, Afrizal dan Zakhiya, 2011) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Begitu juga menurut (Putro, 2010) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Hal ini karena salah satu indikator keberhasilan kemandirian berasal dari pembangunan sebagaimana menurut (Abdul Halim dan Syam Kusufi, 2012) bahwa kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberian layanan kepada masyarakat.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Berdasarkan pengujian yang dilakukan variabel PAD memiliki koefisien regresi sebesar 0,065 dengan nilai prob t-statistic 0.0000. Berdasarkan nilai probability t-statistic yang kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa PAD berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat KM, dimana kenaikan atau penurunan dari PAD akan mempengaruhi naik atau turunnya tingkat kemandirian keuangan daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dapat diterima. Tanda positif pada koefisien menunjukkan hubungan antara kedua variabel yang searah, yaitu ketika PAD kabupaten/kota Jawa Timur mengalami kenaikan maka tingkat kemandirian keuangan daerah juga mengalami kenaikan, begitu juga sebaliknya. Penjelasan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini:

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
BM	-0.010176	0.003079	-3.304785	0.0010
DAK	-0.008422	0.004437	-1.898009	0.0585
DAU	0.002396	0.001820	1.316758	0.1887
DBH	-0.024108	0.005422	-4.446498	0.0000
PAD	0.065047	0.001862	34.92814	0.0000
PDDK	-0.003933	0.000497	-7.906998	0.0000
PDRB	24.01418	10.60349	2.264743	0.0241
C	12.81785	1.046959	12.24294	0.0000

Gambar 2. Nilai Koefisien PAD Regresi Data Panel

Hal ini sesuai dengan penelitian pengaruh PAD terhadap kemandirian keuangan daerah oleh (Marizka, 2013) dengan nilai positif.

Begitu juga dengan (Tahar, Afrizal dan Zakhiya, 2011) yang mengemukakan bahwa PAD memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kemandirian daerah di Kalimantan. Lalu (Erawati & Suzan, 2015) mengemukakan pengujian secara simultan variabel pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

Kriteria uji F jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  pada  $\alpha 0.05$  maka  $H_1$  ditolak namun jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  pada  $\alpha 0.05$ , maka  $H_1$  diterima. Nilai F-statistik dapat dilihat pada hasil regresi data panel FE dimana yang dalam menganalisisnya memerlukan perbandingan nilai prob (F-statistic) dengan tingkat signifikansi  $\alpha=0,05$ . Hal ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi kedua variabel secara simultan terhadap tingkat kemandirian. Hasilnya menunjukkan nilai Prob (F-statistic) sebesar 0,0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat dimaknai pada tingkat keyakinan 95%, variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
BM	-0.010176	0.003079	-3.304785	0.0010
DAK	-0.008422	0.004437	-1.898009	0.0585
DAU	0.002396	0.001820	1.316758	0.1887
DBH	-0.024108	0.005422	-4.446498	0.0000
PAD	0.065047	0.001862	34.92814	0.0000
PDDK	-0.003933	0.000497	-7.906998	0.0000
PDRB	24.01418	10.60349	2.264743	0.0241
C	12.81785	1.046959	12.24294	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.972042	Mean dependent var	18.50184	
Adjusted R-squared	0.968744	S.D. dependent var	26.41193	
S.E. of regression	4.669475	Akaike info criterion	6.021378	
Sum squared resid	8132.890	Schwarz criterion	6.455820	
Log likelihood	-1213.488	Hannan-Quinn criter.	6.193122	
F-statistic	294.7356	Durbin-Watson stat	1.953137	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Gambar 3. Nilai F-Statistik Regresi Data Panel

Hasil yang sama, yaitu sesuai dengan penelitian (Nur'ainy et al., 2013) yang menjelaskan bahwa secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Begitu juga dengan penelitian(Dartanto & Brodjonegoro, 2003) bahwa kebijakan otonomi di Indonesia dinilai memberikan hasil positif bagi daerah, yaitu kombinasi kebijakan PBB, BPHTB, PPh. BHSDA yang komponen itu salah satunya merupakan PAD. Selain itu menurut Pasaribu (2016) bahwa Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah.

Dalam menggambarkan kemandirian wilayah atas pemerintahan di daerah terdapat beberapa pengukuran, yaitu yang pertama digunakan pengukuran dari sisi pendapatan terhadap dana transfer atau yang kedua dari sisi belanja untuk mengukur derajat fiskalnya. Adapun ketika mengukur pertumbuhan pendapatan asli daerahnya disebut sebagai kemampuan keuangan. Kemampuan keuangan pertahun kabupaten/kota di wilayah Jatim tumbuh setiap tahun sebagaimana Tabel 2 dan rata-rata sebesar 14,2%. Menurut tim lit-bang dan fisipol UGM berada pada kategori yang kurang.

Meskipun kemampuan keuangan tersebut naik turun, namun keadaan tersebut apabila diukur dengan kemandirian keuangan dengan membandingkan PAD dengan dana transfer maupun pinjaman akan selalu meningkat sebagaimana pengaruh kedua variabel bebas sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 8 berikut:

Tabel 8 Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur

<b>Tahun</b>	<b>PAD (Rp)</b>	<b>Total Pendapatan (Rp)</b>	<b>Kemampuan Keuangan (%)</b>
2006	2.155.930.612.000	22.407.955.679.000	0,09621
2007	2.475.184.645.000	25.701.645.172.000	0,09630
2008	2.877.234.033.000	29.031.633.996.000	0,09911
2009	3.357.137.100.000	29.344.814.617.937	0,11440
2010	3.749.283.700.000	34.017.975.989.230	0,11021
2011	5.776.221.700.000	40.502.704.605.000	0,14261
2012	7.155.478.900.000	47.108.321.642.933	0,15189
2013	8.996.623.115.000	46.460.066.858.800	0,19364
2014	12.302.739.565.000	68.753.370.440.000	0,17894
2015	14.769.464.926.000	76.937.372.708.000	0,19197
2016	15.414.532.528.858	80.307.296.223.339	0,19194

Sumber: Diolah dari BPS

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dapat mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2003). Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota Jawa Timur dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah secara simultan signifikan. Sehingga apabila pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik maka tingkat kemandirian keuangan daerah akan naik.

#### 4. PENUTUP

Penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian, yaitu pertama, pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, kedua, pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, ketiga, Pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sejalan dengan hasil penelitian ini Pemerintah Provinsi

Jawa Timur perlu melakukan upaya penjagaan tingkat disparitas wilayah kabupaten/kota agar kemandirian semakin meningkat karena PDRB yang tinggi hanya tersebar pada beberapa kabupaten/kota saja. Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa lokus hanya berada pada Provinsi Jawa Timur dan hanya melibatkan variabel PAD dan PDRB saja, sehingga pada penelitian selanjutnya disarankan agar menambah jumlah kabupaten/kota yang diteliti di luar wilayah Jawa Timur, sehingga akan diperoleh hasil yang lebih maksimal terutama untuk menggambarkan Indonesia secara keseluruhan. Selain itu perlu mencari alternatif variabel yang berhubungan dengan kemandirian keuangan daerah misalnya kompetensi pemungut pajak.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Halim dan Syam Kusufi. (2012). Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- BPS Provinsi Jawa Timur. (2015). *Jawa Timur Dalam Angka 2015*.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic of Econometric, Fifth Edition. In *Econometrics*. [https://doi.org/10.1007/978-1-137-37502-5\\_17](https://doi.org/10.1007/978-1-137-37502-5_17)
- Kementerian PPN / Bappenas. (2016). *Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan III Tahun 2016*.
- Kuncoro, M. (2003). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN: Yogyakarta.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian. *Metode Penelitian*.
- Widarjono, A. (2018). Ekonometrika. In *Universitas Terbuka*.

### Jurnal:

- Courchene, T. J., & Melvin, J. R. (2017). A neoclassical approach to regional economics. In *Regional Economic Development* (pp. 169-189). Routledge.
- Dartanto, T., & Brodjonegoro, B. P. S. (2003). Dampak Desentralisasi Fiskal di Indonesia terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Antar Daerah: Analisa Model Makro Ekonometrik Simultan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*. <https://doi.org/10.21002/jepi.v4i1.131>
- Marizka, R. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Barat (Tahun 2006 – 2011). *Jurnal Akuntansi*, 1(3). <https://doi.org/10.1179/1743280412Y.0000000001>
- Rodden, J. (2002). The dilemma of fiscal federalism: Grants and fiscal performance around the world. *American Journal of Political Science*, 670-687.
- Zhuravskaya, E. V. (2000). Incentives to provide local public goods: fiscal federalism, Russian style. *Journal of Public Economics*, 76(3), 337-368.
- Putri, F. G. M., & Sjadili, E. H. (2013). Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Pinjaman Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia Periode 2006-2010). *FE-UI*.
- Sujarwoto, K., & Wachid, A. (2015). Perkembangan Keuangan Daerah di Jawa Timur Pada Masa Desentralisasi Fiskal . *Jurnal Administrasi Publik*. *Jurnal Administrasi Publik*.

- Tahar, Afrizal dan Zakhiya, M. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akutansi Dan Investasi*.
- Yuana, A. P. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Regional Di Era Desentralisasi Fiskal (Studi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Periode 2008-2012). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB*.

**Prosiding Seminar/Konferensi:**

- Darwanto, & Yustikasari, Y. (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *SNA X Makassar*.  
<https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Erawati, N. T., & Suzan, L. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung (Studi Kasus Pada DPKAD Kota Bandung Periode 2009-2013). *E-Proceeding of Management*, 2(3), 3259–3266.
- Nur'ainy, R., Desfitriana, D., & Utomo, R. B. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kota Di Jawa Barat). *Proceeding PESAT*.

**Tesis atau Disertasi:**

- Nurhayani. (2010). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu-Rengat*. Universitas Islam Riau.
- Putro, N. S. (2010). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal (studi kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). In *Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*. Universitas Diponegoro.

**Sumber Rujukan dari Website:**

- Sukarwo. (2017). *Pakde Karwo Paparkan Upaya Prioritas Ungkit Perekonomian* *Jatim*.  
<http://www.antarajatim.com/berita/206866/pakde-karwo-paparkan-upaya-prioritas-ungkit-perekonomian-jatim?>